

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KONDISI
SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2023)**

Skripsi

Oleh

**YOGIE MURTI PRATAMA
NPM1746021016**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023

Oleh

YOGIE MURTI PRATAMA

Secara keseluruhan, Kecamatan Pulau Pisang mengalami perkembangan setelah adanya pemekaran wilayah. Peningkatan infrastruktur dalam hal ini sarana pendidikan dan sarana kesehatan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kondisi ekonomi dan sosial-kependudukan. Sehingga untuk membangun suatu wilayah pemekaran terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan sumber daya manusia terutama faktor pendidikan dan kesehatan. Pemekaran wilayah Kecamatan Pulau Pisang diharapkan dapat lebih fokus terhadap hasil kebijakan yang telah dilakukan setelah adanya pemekaran daerah dan menganalisis seberapa jauh tingkat keberhasilan dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat selama 10 tahun pasca pemekaran. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi yang memperlihatkan keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelum adanya kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Penelitian menggunakan tiga indikator utama dalam melihat perkembangan kesejahteraan yang terdiri dari ekonomi, sosial dan lingkungan dari Huffman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemekaran wilayah Kecamatan Pulau Pisang cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pulau Pisang. Hal ini ditunjukkan dalam aspek pertama ekonomi dengan adanya peningkatan PDRB dalam bidang pertanian dan perkebunan pada hasil perkebunannya. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari aspek kedua sosial yaitu pendidikan yang semakin menurunnya persentase untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi selain itu dalam bidang kesehatan yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Aspek ketiga yaitu lingkungan ekowisata demikian masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya transportasi dan sarana prasarana untuk mendukung ekowisata di Kecamatan Pulau Pisang.

Kata kunci: Dampak Pemekaran, Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik

ABSTRACT

THE IMPACT OF REGIONAL EXPANSION ON SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS (CASE STUDY IN PULAU PISANG SUBDISTRICT, PESISIR BARAT REGENCY, 2023)

By

YOGIE MURTI PRATAMA

Overall, Pulau Pisang Subdistrict has experienced development following regional expansion. Improvements in infrastructure, particularly in education and health facilities, have influenced the enhancement of economic and social-population conditions. Therefore, in developing an expanded region, several factors need to be considered, including the improvement of human resources, especially in education and health. The regional expansion of Pulau Pisang Subdistrict is expected to focus more on the outcomes of policies implemented post-expansion and to analyze the extent of success in efforts to achieve community welfare over the 10 years following the expansion. Welfare here refers to conditions that show a better state compared to the conditions before the policy was implemented. This study uses a descriptive qualitative research method, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Informants were selected based on purposive sampling technique. The research utilizes three main indicators to assess the development of welfare, consisting of economic, social, and environmental aspects according to Huffman. The results show that the regional expansion of Pulau Pisang Subdistrict has had a positive impact on the welfare of its community. This is evident in the first aspect, the economy, with an increase in Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the agriculture and plantation sectors. The impact of the village expansion can be seen in the second aspect, social, with a decreasing percentage of individuals continuing to higher education and health services still not meeting the required standards for healthcare personnel and facilities. The third aspect, the environmental aspect of ecotourism, reveals some weaknesses, including transportation and infrastructure to support ecotourism in Pulau Pisang Subdistrict.

Keywords: Impact of Expansion, Community Welfare, Public Service

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KONDISI
SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2023)**

Oleh

YOGIE MURTI PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Dampak Pemekaran wilayah Terhadap Kondisi social, Ekonomi Dan Lingkungan (studi kasus di kecamatan pulau pisang kabupaten pesisir barat tahun 2023)**

Nama Mahasiswa : **Yogie Murti Pratama**

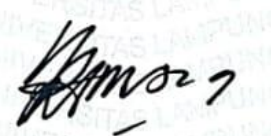
Nomor Pokok Mahasiswa : **1746021016**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs. R. SigitKrisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP.19610807198703 2001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Juni 2024**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Yogie Murti Pratama
Yogie Murti Pratama
NPM. 1746021016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yogie Murti Pratama, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Dilahirkan di Pulau Pisang, Pesisir Barat pada tanggal 1 Mei 1998 dari pasangan Bapak Pihrin Albirori dan Ibu Yuli Kusniarti, S.Pd. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Pasar Pulau Pisang, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama penulis diawali di SMP Negeri 3 Pesisir Utara Kecamatan Pulau Pisang, dan pada kenaikan ke kelas 2 penulis pindah sekolah ke SMP Negeri 1 Nasal. Dan menyelesaikan pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Nasal, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan sekolah menengah atas diawali di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, Pesisir Barat pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Tahun 2017 penulis dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi Gerda Muda BEM-FISIP pada tahun 2017 dan menjadi panitia khusus Pemilihan Gubernur Fisip Unila, mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Cendikia Universitas Lampung pada tahun 2018 dan juga organisasi eksternal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2017. Dan aktif juga HMPPB (Himpunan Mahasiswa Dan Pemuda Pesisir Barat). Pada tahun 2020 penulis melakukan PKL di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil, Pesisir Barat selama 1 bulan. Pada tahun 2021 penulis melakukan KKN di Desa Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Demikian sekilas kegiatan penulis selama kuliah dari tahun 2017-2021.

MOTTO

"Jangan kamu kehilangan Harapan dan Jangan pula kamu bersedih hati."

(Q.S Ali Imran: 13)

"Harapan merupakan satu satunya hal yang lebih kuat di bandingkan ketakutan."

(Oscar Wilde)

"Dengan keyakinan kamu akan bisa melakukannya,namun dengan keraguan jalanmu akan terhenti olehnya, Ingat persepsimu adalah realita ."

(Yogie Murti Pratama)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempurnaan akal dan juga fisik yang sehat, memberikan kelancaran, kemudahan dan sebaik-baiknya penolong serta pemberi kemudahan dalam setiap urusan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Dan

Dengan ketulusan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada
Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Pihrin Albirori dan Yuli Kusniarti

Serta adik-adikku tersayang
Fevia Makharani dan Nabila Dwi Permata

Terimakasih yang tak terhingga untuk kesabaran dan keikhlasan atas semua yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023)”. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya. Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan akan keterbatasan pengetahuan dalam Menyusun skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan:

1. Terimakasih untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu, pencapaian ini aku persembahkan untuk kalian, tak satu hal pun dapat membalas ketulusan dan kasih sayang yang kalian berikan, amat sangatlah beruntung aku terlahir dan dibesarkan kalian, terimakasih banyak Ayah dan Ibu mungkin dimasa depan aku tidak bisa menjadi orang hebat akan tetapi terimakasih banyak sudah menjadi orangtua yang hebat. Sekali lagi Terimakasih banyak.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.SI., selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Drs. Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Penguji. Terimakasih atas segala bimbingannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Bapak dan Ibu Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih banyak untuk adik-adikku tersayang, adik pertamaku Fevia Makharani sosok Perempuan yang hebat yang selalu berusaha membantu dalam keadaan apapun dan mengerti dalam hal apapun. Terimakasih banyak untuk adik bungsuku Nabila Dwi Permata yang sangat lucu, sudah menghiburku dengan tawa bahagiamu di rumah kita. Berkat kalianlah tumbuh banyak semangat dan harapan yang ingin kugapai di kehidupan ini, aku sayang kalian.
10. Terimakasih banyak untuk sahabat kecilku Arjuna Prasatya, andika Candra, Andrea Novelion, Ronaldi yang tidak pernah meninggalkanku walau banyak perbedaan diantara kita dan selalu punya tempat untuk aku bertukar cerita. Terimakasih banyak untuk Segala Hal yang selalu menemaniku dengan seapa adanya sahabatmu ini.
11. Terimakasih banyak untuk Sahabat 69 FOKS (Dendi, Evan, Wando, Prengki, Melki) Sahabat Sahabat Yang Ada Dalam Suka Dan Duka di Bandar Lampung, Yang Berkumpul oleh asal Kabupaten Yang Sama. hal-hal ter-random yang selama ini kita lalui adalah hal yang terseru Selama Berada Di Bandar Lampung. yang dimana kita berteman tanpa rasa malu, bercanda semaunya, ngakak sepuasnya apapun itu kita lakukan demi keseruan dan pengalaman kita bersama.
12. Terimakasih banyak kepada teman teman KOST KUDAN. (Rival, Sandi, Eka, Najam, Riski, Febrian, Neshwa, Putri dan Cindy). Yang Telah menemani dalam suka maupun duka. Selalu menemani dan memberi semangat dalam proses skripsi.

13. Terimakasih banyak kepada keluarga besar HMI Komsopol Unila yang sudah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.
14. Terimakasih banyak kepada keluarga besar HMPPB (himpunan mahasiswa dan pemuda pesisir barat). Telah memberikan kepercayaan dan kesempatan yang begitu besar dalam berorganisasi
15. Terimakasih banyak kepada seluruh teman- teman Jurusan Ilmu Pemerintahan yang sudah memberikan banyak cerita semasa perkuliahan berlangsung terutama Alan Alaska dan Husna Nabila Zhafira yang sudah membantu jalannya skripsi ini.
16. Terimakasih banyak kepada BEM FISIP Unila, yang telah memberikan pengalaman organisasi, motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah.
17. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 14 Mei 2024

Penulis,

Yogie Murti Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Desentralisasi.....	14
2.2 Tinjauan Tentang Otonomi Daerah	15
2.3 Tinjauan Tentang Pemekaran Wilayah.....	17
2.3.1 Pengertian Pemekaran Wilayah.....	19
2.3.2 Tujuan Pemekaran	20
2.3.3 Urgensi Pemekaran.....	21
2.3.4 Aspek Pemekaran Wilayah.....	24
2.4 Kerangka Pikir	27
METODE PENELITIAN	

3.1 Tipe Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Pengolahan Data	34
3.8 Teknik Analisis Data	35
GAMBARAN UMUM	
4.1 Kabupaten Pesisir Barat	37
4.2 Kecamatan Pulau Pisang	39
4.2.1 Sejarah Kecamatan Pulau Pisang.....	39
4.2.2 Letak Geografis Kecamatan Pulau Pisang	40
4.2.3 Kondisi Demografi Kecamatan Pulau Pisang.....	40
4.2.4 Profil Kecamatan Pulau Pisang.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil.....	42
5.2 Pembahasan	61
SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan	65
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Pesisir Barat.....	4
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kab. Pesisir Barat.....	5
Tabel 1.3 Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang.....	7
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2.1 Hasil Pemekaran Daerah.....	18
Tabel 3.1 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	47
Tabel 5.1 APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2023	45
Tabel 5.2 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022.....	46
Tabel 5.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat	48
Tabel 5.4 Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	49
Tabel 5.5 Laju Pertumbuhan PDRB Pesisir Barat atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023	52
Tabel 5.6 Produk Hasil Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	36
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat	38
Gambar 4.2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat.....	39
Gambar 4.3 Lokasi Pantai Sukaraja	54
Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019- 2023.....	51

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem kekuasaan negara pasca reformasi tahun 1998 terutama pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang mengalihkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Guntoro, 2021).

Salah satu manifestasi konkret dari desentralisasi adalah pemekaran wilayah, yaitu pembentukan daerah otonom baru baik dalam bentuk provinsi, kabupaten, maupun kecamatan yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh pemerintahan pusat.

Pembangunan tidak sekadar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai, namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang lebih

luas (Widianingsih & Pancasilawan, 2018:4). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan juga mempertimbangkan faktor lain yang dapat merubah kehidupan sosial masyarakat kearah yang lebih baik (Rosana, 2018). Mewujudkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, bertujuan untuk mengurangi berbagai ketimpangan (Disparitas) antar wilayah/daerah, antar sektor dan antar kelompok ekonomi. Untuk itu selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai (Ristanti et al., 2017), juga ada tiga kriteria sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan yaitu kemiskinan, pengangguran dan distribusi/pembagian pendapatan nasional (Widayanti et al., 2017).

Pemekaran wilayah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal inipun secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Pemekaran wilayah merupakan proses administratif di mana suatu daerah dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Pemekaran wilayah di Indonesia telah menjadi tren yang signifikan sejak era otonomi daerah dimulai pada tahun 1999. Pemerintah memandang pemekaran sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Uraian tersebut mencerminkan bahwa alasan utama yang menuntut daerah untuk dimekarkan secara umum berkaitan dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan. (Bustami, 2018)

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan jumlah daerah otonom baru. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 500 kabupaten/kota dan ribuan kecamatan yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah. Alasan di balik pemekaran ini bervariasi, mulai dari dorongan politik lokal, kebutuhan administrasi, hingga aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Pada prinsipnya, pemekaran wilayah dilakukan untuk mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat (Rasyid, 2017). Pemekaran wilayah memiliki dampak yang luas dan beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Namun, pemekaran wilayah dapat memunculkan konflik keruangan apabila tidak disertai dengan batas sistem wilayah pembangunan yang jelas (Harmantyo, 2017).

Harapan dengan adanya pemekaran wilayah ini adalah terjadi pertumbuhan ekonomi, yang indikasinya dapat dilihat dari peningkatan sektor sekunder serta tersier dalam hal ini dalam aspek infrastruktur. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Susanti (2014) mengenai pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Utara bahwa pemekaran wilayah berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat ditandai dengan peningkatan nilai PAD serta terjadi pula peningkatan kualitas infrastruktur. Ini dikarenakan pemekaran wilayah dapat mengurangi luas daerah dan cakupan kendali pemerintahan yang semakin sempit sehingga akan memudahkan untuk terjadi pemerataan pembangunan.

Perkembangan suatu wilayah itu sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tersedia pada suatu daerah. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan bahwa kebijakan apapun yang diambil dalam pengembangan suatu wilayah, khususnya dalam kebijakan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari potensi lokal yang ada di wilayah tersebut karena akan meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, populasi yang terus meningkat di suatu daerah perlu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur sehingga kesejahteraan dapat tercapai dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagai dasar tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri (Riani dan Pudjihardjo, 2012).

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat dengan Dasar Hukum UU No.22 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Kabupaten ini berada di di ujung paling barat wilayah Provinsi Lampung yang berdekatan dengan Samudera Hindia, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Berhadapan dengan Samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang 210 kilometer dan dikelilingi lebatnya hutan tropis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki bentang alamyang luar biasa. Kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sering disebut sebagai “surga wisata” di Asia karena memiliki kekayaan yangmelimpah dalam hal pariwisata. Negara dengan tujuan utama pariwisata di ASEAN diantaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 164.453 jiwa, yang terdiri atas 81.695 laki-laki dan 74.188 perempuan. Dari hasil SP 2020 terdiri dari 11 kecamatan, 2 kelurahan, dan 116 Pekon. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 155.964 jiwa dengan luas wilayah 2.907,23 km² dansebaran penduduk 53 jiwa/km². Berikut disajikan tabel yang akan memaparkan kecamatan, jumlah penduduk dan luas total kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Luas Total Kecamatan Pesisir Barat

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Luas Area (km ²)
1	Lemong	13,04	454,97
2	Pesisir Utara	8,57	84,27
3	Pulau Pisang	1,57	64
4	Karya Panggawa	15,86	211,11
5	Way Krui	8,89	40,92
6	Pesisir Tengah	20,04	120,64
7	Krui Selatan	10,72	36,25

8	Pesisir Selatan	26,85	409,17
9	Ngambur	22,09	327,17
10	Ngaras	9,67	215,03
11	Bangkunat	27,50	943,7

Sumber: BPS Pesisir Barat, 2023

Selanjutnya, berdasarkan data BPS Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa Pesisir Barat merupakan kabupaten/kota dengan angka kemiskinan yang relatif naik turun di Provinsi Lampung pada tahun 2022. Dalam data tersebut, persentase penduduk miskin di kabupaten Pesisir Barat naik secara signifikan dari tahun 2015 – 2018, yaitu pada tahun 2019 sebesar 13,84%, dan mulai menurun 1% sampai tahun 2022 hingga mencapai 14,98% pada tahun 2018. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat

Tahun	Indeks Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	0,64	24,03	15,81
2016	0,72	24,20	15,91
2017	0,48	23,76	15,61
2018	0,59	22,98	14,98
2019	0,31	22,38	14,48
2020	0,35	22,24	14,29
2021	0,59	23,23	14,81
2022	0,53	21,85	13,84

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Tabel di atas memaparkan indeks kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Pesisir Barat sampai tahun 2021 masih tergolong posisi tinggi ke-empat di Lampung. Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu tugas

terpenting bagi pemerintah daerah. Padahal, sebenarnya kabupaten ini menyimpan potensi yang sangat kaya, yang mana sebagian kawasannya merupakan daerah potensi wisata, salah satunya Kecamatan Pulau Pisang.

Kecamatan Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu daerah yang mengalami pemekaran wilayah baru-baru ini. Kecamatan ini memiliki karakteristik geografis yang unik dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Secara geografis, Kecamatan Pulau Pisang terletak pada koordinat 5o7'15" LS dan 103o50'45"BT. Lokasi tersebut cukup berbeda dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Pesisir Barat karena berada dalam pulau kecil. Kecamatan ini pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Pesisir Utara yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/508/B.II/HK/2012 tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan Pulau Pisang. Kecamatan Pulau Pisang memiliki luas wilayah 313 Hektare dengan jumlah penduduk 1.971 Jiwa dan memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

Setelah di lakukannya pemekaran kecamatan, yang perlu diketahui adalah bagaimanakah pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Kecamatan merupakan ujung tombak dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya Kecamatan Pulau Pisang. Kecamatan Pulau Pisang merupakan pulau yang berada di perairan Samudera Hindia. Untuk menuju pulau ini, ada dua jalur alternatif penyebrangan yang dapat di akses, yang pertama melalui pelabuhan penyebrangan Kuala setabas di Kota Krui Pesisir Barat dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai satu jam. Sementara itu, alternatif yang kedua adalah melaului pelabuhan penyeberangan dari Desa Tembakak dengan waktu tempuh lebih cepat yaitu sekitar 15-30 menit menggunakan perahu (jukung) bermesin. Akan tetapi jukung yang di gunakan sebagai transportasi hanya melakukan penyebrangan di waktu tertentu saja.

Melihat dari sisi positifnya pemekaran kecamatan tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Dengan pemekaran ini daerah mempunyai peluang yang begitu besar untuk lebih diperhatikan dan keluar dari keterbelakangan maupun ketertinggalan (Suradinata, 2000:10). Kecamatan

merupakan salah satu perangkat daerah di atas desa dan kelurahanyang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan harusberupaya memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi melayani masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan, dengan melihat kenyataan bahwa pelaksanaanya berdampak baik atau buruk terhadapefektivitas pelayanan masyarakat pada saat sebelum terjadinya pemekaran dikecamatan tersebut. Oleh karena itu sasaran yang hendak di capai dengan pemekaran kecamatan tersebut apakah berdampak baik atau sebaliknya bagi efektivitas dan kualitas terhadap pelayanan masyarakat.

Namun, seperti halnya pemekaran wilayah di daerah lain, pemekaran di Kecamatan Pulau Pisang juga membawa tantangan tersendiri. Luas wilayah dan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan yang memakan waktu dan kondisi nyata tidak meratanya pembangunan, yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pelayanan publik yang cepat juga menjadi hal yang perlu ditelaah untuk melihat dampak dari pemekaran ini. Selanjutnya terabaikannya pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi seperti cengkeh, kopra, kopi, hasil laut, dan potensi pariwisata, adanya keterbatasan sarana dan prasarana fisik pendidikan dan kesehatan, juga termasuk akses penghubung Pulau Pisang dengan daerah lainnya yang belum terbangun membuat warga Pulau Pisang sedikit terisolasi dari daerah sekitarnya. Tak hanya itu, terdapat juga aspek lain yang terpengaruh akibat pemekaran ini seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Pulau Pisang

Aspek	2016- 2020	2021- 2022
Kependudukan	Jumlah Penduduk 1349	Jumlah Penduduk 1349
Kesehatan	Jumlah Puskesmas 1	Jumlah Puskesmas 1
Pendidikan	Jumlah Sekolah 5	Jumlah Sekolah 5
Sarana	Listrik 553	Listrik 523

Sumber: BPS Kecamatan Pulau Pisang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada aspek kependidikan menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Pulau Pisang masih minim selama kurang lebih enam tahun berturut-turut. Selain itu, masih minimnya warga masyarakat di Pulau Pisang yang menempuh jenjang pendidikan tinggi menjadi masalah yang berarti, karena secara geografis dan potensi alam yang dimiliki, Pulau Pisang merupakan aset berharga yang seharusnya bisa mendatangkan banyakturis asing masuk ke dalamnya, mengingat di daerah Tanjung Setia, panorama turis asing berselancar cukup dibilang menarik perhatian. Di samping itu Pulau Pisang juga belum dikenal akan potensi cengkeh yang dimilikinya, karna minimnya informasi yang disebar, terlebih mereka yang meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang mengenyam bangku perkuliahan, perlu didorong lebih untuk dapat memaksimalkan dan lebih mengenalkan potensi di Pulau Pisang.

Selanjutnya, pada aspek kesehatan terdapat hambatan menonjol bagi pembangunan kesehatan terutama di puskesmas pulau pisang adalah kondisi geografis yang menyulitkan akses, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, serta minimnya sumber daya manusia, ketersediaan dan kualitas sumber daya medis. Puskesmas Pulau Pisang belum memiliki prasarana dan sarana yang memadai dan memerlukan dukungan fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan seperti Ambulance laut/Jukung, Rumah Singgah, IPAL, dan obat-obatan yang tepat guna. Sementara itu pada aspek sarana, ketersediaan listrik mengalami penurunan pemasokan di tahun 2021-2022, dimana listrik yang tersedia belum 24 jam. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pariwisata di sana, yangmana biasanya wisatawan di Pulau Pisang datang pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Selain itu kurangnya sarana penginapan dan sarana-sarana penunjang kegiatan wisata seperti toko kebutuhan sehari-hari, rumah makan, kamar mandi umum, kapal yang masih menggunakan kapal tradisional, dan tidak ada tempat yang menyewakan kebutuhan surfing atau snorkeling juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan dan pembangunan wilayah ini.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Andi, 2014). Adapun tujuan pemekaran wilayah adalah untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah, agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang lain. Dengan pemekaran diharapkan masyarakat merasakan peningkatan pelayanan, memudahkan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan akan tercapai.

Perkembangan suatu wilayah itu sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tersedia pada suatu daerah. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan bahwa kebijakan apapun yang diambil dalam pengembangan suatu wilayah, khususnya dalam kebijakan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari potensi lokal yang ada di wilayah tersebut karena akan meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, populasi yang terus meningkat di suatu daerah perlu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur sehingga kesejahteraan dapat tercapai dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagai dasar tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri.

Sekarang yang perlu di persoalkan apakah dengan di lakukannya pemekaran kecamatan ini dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap masyarakat atau tidak, sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat dan tentu menjadi tujuan dari pemekaran itu sendiri, terutama pengaruh dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang di berikan pada pemekaran tahun 2017 dan pada tahun 2023 saat ini. Perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui pengembangan wilayah di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat sebelum dan setelah pemekaran dengan pembatasan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menyoroti tentang evaluasi pemekaran wilayah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wilayah di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat sebelum dan setelah pemekaran dengan pembatasan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Lestiawati (2018)	Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Pemerataan Pembangunan	Pemekaran desa ini dipengaruhi oleh Faktor ekonomi yang kurang sehingga mengakibatkan dan lambatnya pembangunan.
2.	Hasriani (2016)	Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali	Setelah pemekaran desa cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali
3.	Lifia Anis Tahara Andi Lantara (2016)	Pengaruh Pemekarana Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dna Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.)	Pertama Kondisi pembangunan dan pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi di dukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat

ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Peneliti pertama oleh Lestiawati (2018) yang berjudul Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis deskriptif. Dimana penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitiannya adalah di Pekon Lintuik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran desa ini dipengaruhi oleh Faktor ekonomi yang kurang sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan. Namun demikian adanya pemekaran desa yang berjalan lebih kurang selama 7 tahun ini membuahkan hasil yaitu percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintahan pasca pemekaran desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hasriani (2016) yang berjudul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, oleh Hasriani, 20 Juni 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif Kualitatif yang menggambarkan tentang dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan di desa Tafagapi dengan menggunakan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian ini seluruh warga masyarakat Desa Tafagapi dengan penarikan sampel secara cluster random sebanyak 25 KK masyarakat desa Tafagapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setelah pemekaran desa cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan

Kabupaten Morowali. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan dan sarana jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Lilia Anis Tahara Andi Lantara (2016) yang berjudul pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran wilayah Kecamatan Tana Lili. Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada data kuantitatif yang diperoleh melalui kuisioner dan didukung oleh data kualitatif melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka mengetahui implikasi pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan 2 hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan dan pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi didukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik

Adapun hal membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan kepada ketiga aspek yang terdampak dari sebelum dan sesudah pemekaran di Pulau Pisang. Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat. Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. Alasan lain yang mendasari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami secara menyeluruh dampak dari pemekaran wilayah di Kecamatan Pulau Pisang. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca pemekaran. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang mempertimbangkan pemekaran wilayah sebagai strategi pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi dampak pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang dampak pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam dampak pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Desentralisasi

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Konsep desentralisasi banyak dikemukakan oleh para ahli dengan perspektif ilmu politik maupun ilmu administrasi publik. Cheema dan Rondinelli (1983), menjelaskan bahwa desentralisasi adalah sebagai penyerahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan, atau administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi lapangannya, uniadministratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat. Konsep tersebut mengandung makna penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah atau unit yang ada di bawahnya dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan administrasi, adalah sebagai inti dari desentralisasi.

Secara teoritis, desentralisasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipilih dalam rangka proses demokratisasi pada tingkat lokal. Dalam pembahasan Smith (1986) yang dikutip oleh Ratnawati dalam Karim (2003), desentralisasi diperlukan pada umumnya karena faktor-faktor: 1) untuk pendidikan politik; 2) untuk latihan kepemimpinan politik; 3) untuk memelihara stabilitas politik; 4) untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat; 5) untuk memperkuat akuntabilitas publik; dan 6) untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sudut pandang politik, menurut Ratnawati dalam Karim (2003), dikemukakan bahwa desentralisasi diartikan sebagai '*transference of authority, legislative, judicial, or administrative, from a higher level of government to a lower level*', atau devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal.

Penyerahan wewenang dalam bidang legislatif, hukum atau administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah. Pernyataan tersebut menegaskan merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata.

Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang yang di berikan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah sendiri diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan tanggung jawab.

2.2 Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya kebijakan desentralisasi telah melahirkan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau disebut juga dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud urusan pemerintah yaitu adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk membangun partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Hanya saja,

otonomi harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar, terutama pada sumber daya manusianya. Masyarakat dari berbagai level pada umumnya telah terbiasa pada sistem yang serba pasif dan hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat saja. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sistem sentralistik yang telah mendarah daging dalam masyarakat inilah yang merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mengacu pada uraian dan penjelasan tentang konsepsi desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai perubahan UU sebelumnya, menempatkan urusan negara secara umum menjadi *domain* pemerintah pusat. Oleh karena itu, sejumlah urusan yang terjadi di daerah tentunya menjadi bagian pemerintah daerah dalam memerankannya.

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pembangunan daerah tak akan datang dan terjadi begitu saja. Pembangunan daerah-daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi antara lain: fasilitas, pemerintah daerah harus kreatif, politik local yang stabil, pemerintah daerah harus komunikatif dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup (Hidayat dan Azra, 2008).

Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws* (Nyoman Sumaryadi, 2005). Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi akan dapat digali secara optimal jika masing-masing daerah diberi keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya.

Pelaksanaan otonomi daerah walaupun masih banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi banyak segi positif yang dapat terus dipacu dan dikembangkan agar dapat menumbuhkan iklim kondusif dengan tujuan supaya bisa memperkuat daerah, khususnya desa sebagai pondasi penguatan ekonomi guna mencapai kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan amanat konstitusi (Hilman, 2017). Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa beberapa daerah otonom belum

mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain diantaranya kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin melebar.

2.3 Tinjauan Tentang Pemekaran Wilayah

2.3.1 Pengertian Pemekaran Wilayah

Pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan atau meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonomi dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Hasriani, 2016). Pemekaran daerah/wilayah lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa daerah otonomi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan sumber sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah-wilayah kelompok, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah (Rosramadhana, 2016).

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selain itu juga Undang-Undang No 23 tersebut menyantumkan tentang pengertian Daerah, yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri. Untuk itu, harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Pemekaran daerah tersebut setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, karena kondisi ketimpangan kesejahteraan, di mana wilayah yang mengusulkan pemekaran daerah merasa besarnya pendapatan

daerah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat di wilayahnya (Maulana dan Saraswaty, 2019). Kedua, karena kondisi geografis yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Wilayah yang terlalu luas, membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang lokasinya terlalu jauh dengan ibu kota kabupaten induk, merasa sangat mahal ketika mereka perlu mengakses pelayanan publik. Perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten induk juga sangat minim. Itulah mengapa, ada 91 dari 172 DOB hasil pemekaran yang merupakan daerah tertinggal dan lokasinya sangat jauh dari ibu kota kabupaten induknya. Dengan pemekaran daerah, diharapkan rentang kendali pemerintahan menjadi lebih mudah dan efisien, pelayanan publik menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Zuhro, 2019).

Tabel 2.1 Hasil Pemekaran Daerah

Tahun	KBI			KTI			Jumlah
	Non		Jumlah	Non		Jumlah	
	DT	DT		DT	DT		
2001	0	12	12	0	1	1	13
2002	11	5	16	18	3	21	37
2003	19	7	26	19	3	22	48
2007	4	8	12	8	5	13	25
2008	4	9	13	17	2	19	32
2012	2	2	4	5	2	7	11
2013	1	0	1	2	0	2	3
2014	0	0	0	0	3	3	3
Jumlah	41	43	84	69	19	88	172

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2014

Pemekaran yang dilihat dari perspektif politik administrasi pemerintahan pusat, pemekaran wilayah merupakan penambahan jumlah daerah baru (kota, daerah, provinsi, atau desa). Dengan penambahan daerah baru, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat, seperti penambahan

jumlah kepala daerah dan semua struktur yang ada dibawahnya, dan hal demikian tersebut membutuhkan biaya rutin setiap bulan dan tahunan. Ratnawati berpendapat bahwa pemekaran saat ini tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tertera dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan demokrasi lokal untuk memaksimalkan akses public pemerintahan, mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, dan menyediakan pelayanan publik dengan seefisien mungkin (Frans, 2000).

Dimensi utama yang menjelaskan efektif tidaknya penataan (pemekaran) daerah adalah pengawasan, komunikasi, dan koordinasi yang kesemuanya turut menentukan terhadap tingkat pelayanan masyarakat. Semakin jauh penduduk dari pusat pemerintahan, semakin kecil memperoleh sentuhan pelayanan. Permintaan terhadap pelayanan semakin meningkat menuntut pusat-pusat pemerintahan memperluas daerah layanannya. Akan tetapi pusat-pusat pelayanan memiliki keterbatasan (radius) jangkauan, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan lain yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian dengan adanya penataan (pemekaran) daerah berarti menambah pusat-pusat pemerintahan sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simangunsong, 2016).

Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi

masyarakat akan meningkat karena akses yang lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif karena wilayah pengawasan relatif lebih sempit (Sudiar, 2017).

2.3.2 Tujuan Pemekaran

Tujuan pemekaran menurut Hermanislamet (2015) adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. Sektor formal dan informal menjadi tuntutan yang tak terelakkan demi optimalisasi kegiatan perekonomian masyarakat. Penciptaan usaha-usaha baru dalam perekonomian secara langsung tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun politik dan pemerintahan.

Akibat dari usaha percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mempercepat proses pemerataan ekonomi dalam pembangunan demi mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena akses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, *trickle down effect*, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena akses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, *trickle down effect*, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Alasan lain munculnya inisiatif pemekaran wilayah dari daerah adalah terkait

dengan rentang kendali dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak meratadan jauh (geografi), infrastruktur, dan sarana & prasarana penghubung serta pembangunan ekonomi. Jika dilihat dari gambar 1 di atas alasan tersebut saling berkaitan antara geografi dan pelayanan publik yang menunjukkan kuatnya dorongan setelah alasan ekonomis secara umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 menguraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Sabarno (2017) menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah; dan
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

2.3.3 Urgensi Pemekaran Wilayah

Menurut Kaloh, terdapat beberapa urgensi dari adanya pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- b. Memperpendek span of control (rentang kendali) sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali;
- c. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan kembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat; serta
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasimasyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik (Kaloh, 2007).

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salahsatu pendekatan yang cukup dinikmati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik menurut Amroni (2019) yaitu:

- a. Dampak Pada Pelayanan Pubik

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarakgeografis antara permukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan pemerintahan dibawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Pemekaran juga dapat menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanyakebutuhan belanja aparat dan infrastruktur 34 pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) dalam posisi

sebagai daerah otonom baru.

b. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi

Pasca terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi wilayah yang baru di beri status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah lainnya. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakan pemekaran 35 daerah. Melalui kebijakan pemekaran daerah. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang menyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukan tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

c. Dampak Sosial Kultural

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah.

Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

2.3.4 Aspek Pemekaran Wilayah

Dalam konteks desentralisasi dan pemekaran wilayah menurut Hoffman (2005) terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur dampak pemekaran wilayah, antara lain faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

a. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan salah satu poin utama penentu atas upaya pemekaran. Pemekaran wilayah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, seperti penambahan sarana pendidikan dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan. Pemekaran wilayah juga dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, dengan adanya sarana yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau. Hal ini dapat dilihat beberapa indikator seperti jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan baru yang dibangun, jarak rata-rata rumah tangga ke fasilitas layanan publik, serta tingkat literasi dan angka harapan hidup. Selain itu, pemekaran wilayah dapat mempengaruhi

struktur masyarakat, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan wilayah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah (Dommy, 2019). Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal seringkali meningkat setelah pemekaran wilayah. Pemerintah daerah yang lebih kecil cenderung lebih dekat dengan warga, sehingga memudahkan interaksi dan partisipasi. Adapun indikator yang dapat dilihat antara lain, jumlah dan frekuensi pertemuan publik atau musyawarah warga, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan lokal, dan jumlah warga yang terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi komunitas.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dijadikan masyarakat sebagai kunci untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Pemekaran wilayah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan dari usaha-usaha lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, pemekaran wilayah dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur, seperti peningkatan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, yang memudahkan mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Pemekaran wilayah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan wilayah (Dommy, 2019).

Pemekaran wilayah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal yang dapat dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi lokal dan asing, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pemerintahan yang lebih dekat, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan lebih merata. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat pengangguran sebelum dan sesudah pemekaran, rata-rata

pendapatan per kapita, dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang. Kemudian, pemekaran juga bisa mendorong disverifikasi ekonomi dengan memfokuskan pada potensi unggulan lokal yang dapat dilihat dari umlah sektor ekonomi baru yang tumbuh, presentase kontribusi sektro non-tradisional terhadap PDRB, dan tingkat inovasi dan kewiraushaaan lokal.

c. Faktor Lingkungan

Pada faktor ini, pemekaran wilayah dapat meningkatkan pengembangan sarana lingkungan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan lingkungan. Pemekaran wilayah juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan lingkungan dan peningkatan upaya-upaya pengembangan lingkungan yang lebih baik. Lalu pemekaran wilayah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan lingkungan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan lingkungan dan peningkatan upaya-upaya pengembangan lingkungan yang lebih baik (Dommy, 2019).

Berdasarkan faktor lingkungan ini, diharapkan pemerintah daerah yang lebih kecil diharapkan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya alam, mengelola eksploitasi secara berkelanjutan yang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kebijakan dan regulasi baru terkait pengelolaan sumber daya alam, tingkat eksploitasi versus konservasi sumber daya, dan proyek-proyek lingkungan yang dilaksanakan. Tak hanya itu, dampak lingkungan dari pemekaran wilayah sejatinya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lokal dan pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga indikator lain seperti kualitas air, udara, dan tanah sebelum dan sesudah pemekaran, tingkat polusi dan upaya mitigasi yang dilakukan, serta indeks kesehatan ekosistem lokal perlu

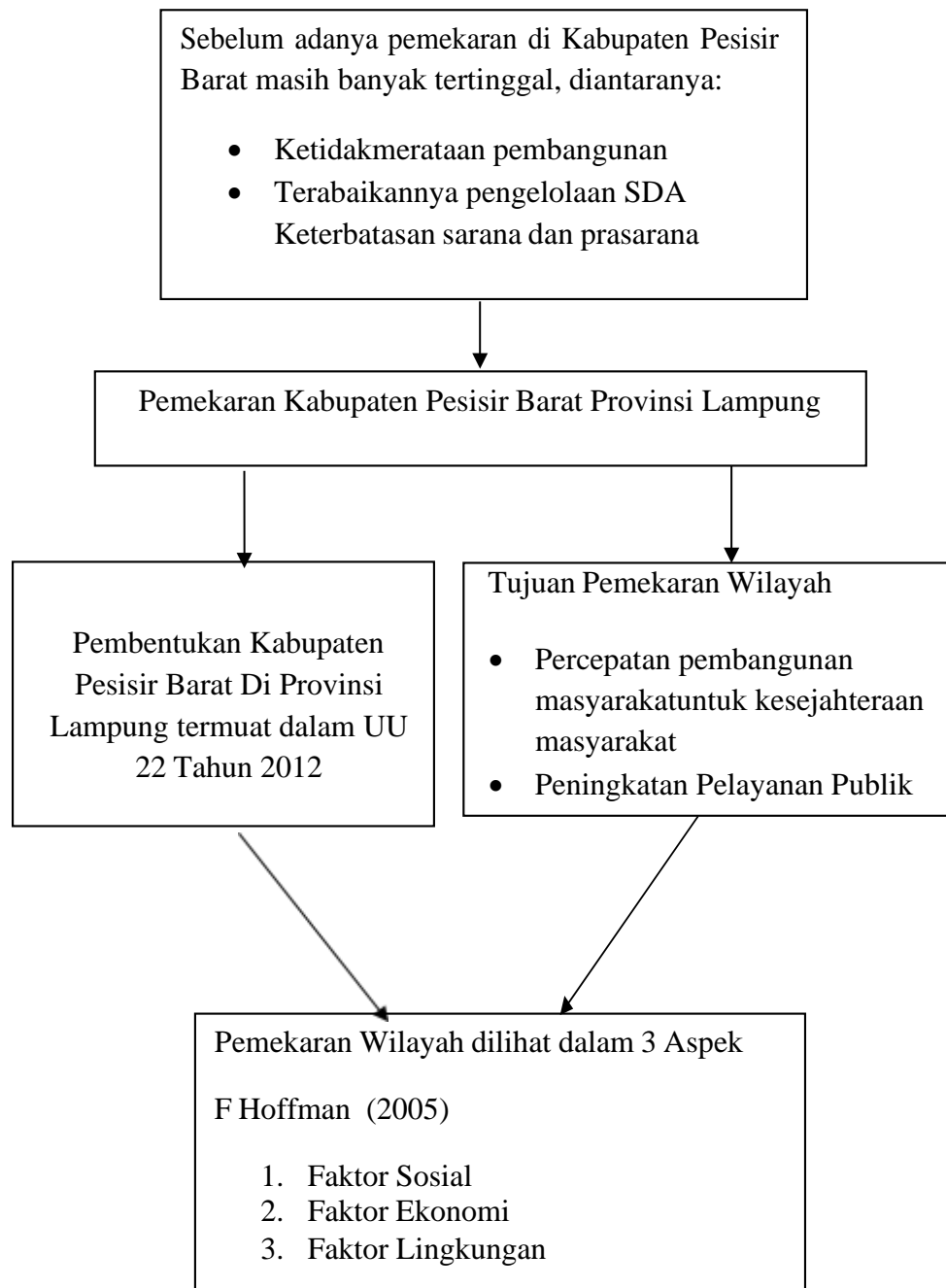
diperhatikan. Pemekaran juga seringkali mempengaruhi pola penggunaan lahan, yang bisa berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, perubahan luas lahan pertanian, hutan, dan permukiman, dampak terhadap keanekaragaman hayati dan habitat alami, serta rencana tata ruang wilayah dan implementasinya pun perlu menjadi salah satu indikator yang diperhatikan juga.

2.4 Kerangka Pikir

Dalam konteks otonomi daerah dapat dipahami bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran daerah diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan bukan untuk memperkuat daerah agar pada saatnya nanti dapat melepaskan diri dari pusat. Penambahan daerah otonom ini merupakan fenomena yang layak dikaji ulang. Sebab, pemekaran atau penambahan daerah otonom yang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia sekarang ini tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, akibatnya yang terjadi adalah tersendatnya roda pemerintahan daerah dan carut-marutnya tata pemerintahan.

Dengan adanya pemekaran wilayah juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pengurusan identitas penduduk. Pemekaran wilayah juga seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja dan secara langsung pendapatan masyarakat juga akan bertambah.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai dampak pemekaran terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten PesisirBarat. Hal ini sehubungan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya (Jauhari, 2010).

Alasan lain dari dipilih nya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep(Sanyoto, 2012). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pemekaran wilayah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan infastruktur di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten PesisirBarat dan teridentifikasi permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang memberikan gambaran tentang dampak pemekaran terhadap kesejahteraan Masyarakat di KecamatanPulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana

data yang tidak relevan (Moleong, 2007). Maka fokus penelitian ini adalah mengetahui dampak pemekaran terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. dapat dilihat dari faktor:

a. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan salah satu poin utama penentu atas upaya pemekaran. Pemekaran wilayah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan publik. Selain itu pemekaran juga dapat memengaruhi struktur masyarakat, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan wilayah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dijadikan masyarakat sebagai kunci untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal yang dapat dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi lokal dan asing, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pemerintahan yang lebih dekat, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan lebih merata. Kemudian, pemekaran juga bisa mendorong diversifikasi ekonomi dengan memfokuskan pada potensi unggulan lokal.

c. Faktor Lingkungan

Pada faktor ini, pemekaran wilayah dapat meningkatkan pengembangan sarana lingkungan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengembangan lingkungan. Berdasarkan faktor lingkungan ini, diharapkan pemerintah daerah yang lebih kecil diharapkan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya alam, mengelola eksploitasi secara berkelanjutan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang teridentifikasi permasalahan pada pembangunan infrastruktur salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi adalah Pembangunan gedung kantor Camat yang terletak di di Pekon Bandar Dalam tidak tepat penempatan padahal sudah berdiri bangunannya dan kantor camat tersebut sangat sulit dijangkau oleh masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, 2 Tokoh Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor desa serta instansi yang terkait. Data sekunder yang digunakan bersumber dari, 50 dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh BPS

(Badan Pusat Statistik). Jenis data yang digunakan adalah data Time Series dan Data akan dibagi menjadi dua bagian yaitu data sebelum dan data sesudah pelaksanaan pemekaran. Data yang diambil adalah data (pemekaran) pada tahun 2019-2022, dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Desa Tahun 2014. Tentang Keuangan Desa & Aset Desa. Pasal 72 Ayat 2. Undang-Undang Desa Tahun 2014. Tentang Penataan Desa. Pasal 8 Ayat 3, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No.32 Tahun 2004. LN No.125 tahun 2004, TLN No. 4437 Indonesia.

3.5 Informan

Informan menurut Sugiyono (2014) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. Berikut tabel informan penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan
1	Camat Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat
2	Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat
3	Staf Pengelola Infrastruktur di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat
4	Mayarakat Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 5 orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek sosial yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan syang tidak merata sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti secara langsung berkunjung dilokasi penelitian yaitu di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. Melalui observasi peneliti mencari informasi yang lebih banyak dengan menggali informasi terkait pembangunan infrastuktur di wilayah tersebut.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh pada masalah yang diteliti mengenai Evaluasi Pemekaran Wilayah Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat, selain itu juga terdapat Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dan konsep pemekaran wilayah di suatu daerah.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.

b. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan mengenai dampak pemekaran terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yaitu menggunakan evaluasi tipe evaluasi sistematis dengan melihat ketercapaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014). Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini mengenai mengenai dampak pemekaran terhadap kesejahteraan Masyarakat di KecamatanPulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yaitu menggunakan evaluasi tipe evaluasi sistematis.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan padapenarikan kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Pesisir Barat

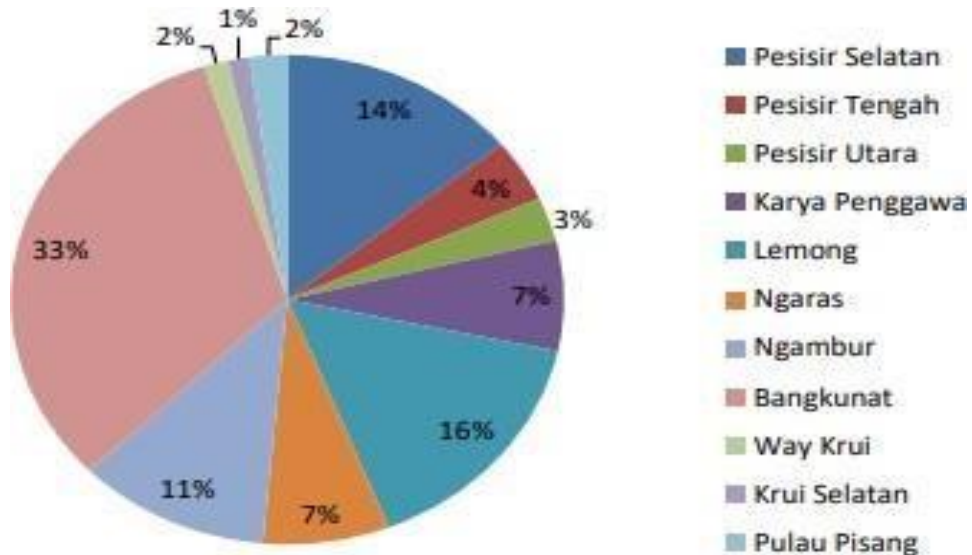
Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu Kota Krui adalah salah satu dari lima belas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012. Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai samudera hindia dengan letak wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas $\pm 2.907,23$ Km² atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km (daratandan garis pulau-pulau) dan garis pantai daratan 210 Km dengan jumlah penduduk sebesar ± 156.276 jiwa dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bengkunt Belimbing dengan luas 943,70 Km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 Km². Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

- a. Timur: Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

- b. Selatan: Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Barat: Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
- d. Utara: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa PancurMas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kuta besi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Nanningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan

Sementara itu, luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif per kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Luas Wilayah per-Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017

Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan pada umumnya mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 500 meter dpl. Bentuk bentang alam sepanjang pesisir barat datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar antara 3 – 5 persen. Di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit.



Gambar 4.2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat
Sumber: Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017

4.2 Kecamatan Pulau Pisang

4.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Pulau Pisang

Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Pulau Pisang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pesisir Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 06 Tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan baru yang di resmikan oleh Bupati Lampung Barat pada Tanggal 26 Juli 2012 sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan Lampung Barat. Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang menghasilkan kecamatan baru dengan ibukota kecamatan berada pada Pekon Labuhan, sedangkan

wilayah Kecamatan Pulau Pisang terdiri dari 6 pekon, yaitu Pekon Pasar Pulau Pisang, Pekon Labuhan, Pekon Bandar Dalam, Pekon Lok, Pekon Sukadana, dan Pekon Sukamarga.

4.2.2. Letak Geografis Kecamatan Pulau Pisang

Secara geografis pulau pisang terletak pada koordinat $5^{\circ} 7' 15.000''$ LS dan $103^{\circ} 50' 45.138''$ BT. Jarak Kecamatan Pulau Pisang dari Ibukota Kabupaten (Krui) ± 20 KM, sedangkan dari Ibukota Provinsi (Bandar Lampung) ± 330 KM. Luas wilayah Kecamatan Pulau Pisang ± 2250 Ha atau 1,423 km². dengan batas fisik Kecamatan Pulau Pisang berbatasan dengan Samudera Hindia, sedangkan batas wilayah administrasi Kecamatan Pulau Pisang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Utara.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Tengah.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudra Hindia.

Untuk mencapai Pulau Pisang dapat ditempuh melalui 2 Pelabuhan kecil untuk penyeberangan yaitu melalui Pelabuhan Tebakak dan Pelabuhan Kuala dengan menggunakan perahu nelayan, perahu bercadik atau jukung. Penyeberangan melalui Pelabuhan Tebakak dapat ditempuh dalam waktu ± 20 menit, namun jika ditempuh dari Krui melalui Pelabuhan Kuala memakan waktu $\pm 1,5$ jam. Tetapi dikarenakan wilayah Kecamatan Pulau Pisang dikelilingi Samudera Hindia atau laut lepas, terkadang jukung tidak bisa beroperasi dikarenakan angin kencang dan ombak besar setinggi $\pm 3 - 5$ meter.

4.2.3. Kondisi Demografi Kecamatan Pulau Pisang

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan tidak stabil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten termuda di Provinsi Lampung menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah semakin berkembang. Yang mana dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi. Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan tidak stabil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah semakin berkembang. Yang mana dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi. Pada tahun 2022 (hingga Semester I Tahun 2022) jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 167.339 Jiwa yang terdiri dari 86.887 Jiwa penduduk Laki-laki dan 80.452 Jiwa penduduk wanita dengan total 48.348 Kepala Keluarga. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	10.409	9.939	20.384	5.882
2	Pesisir Selatan	14.248	13.385	27.633	7.863
3	Lemong	6.811	6.098	12.909	3.759
4	Pesisir Utara	4.451	4.162	8.613	2.529
5	Karya Penggawa	8.250	7.613	15.863	4.417

6	Pulau Pisang	859	800	1.659	549
7	Way Krui	4.738	4.413	9.151	2.647
8	Krui Selatan	5.667	5.345	11.012	3.076
9	Ngambur	11.589	10.908	22.497	6.621
10	Ngaras	5.238	4.738	9.976	2.809
11	Bangkunat	14.627	13.051	27.678	8.196
Jumlah		86.887	80.452	167.339	48.339

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, 2023

4.2.4. Profil Kecamatan Pulau Pisang

Kantor Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat sebagai salahsatu instansi pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintahan ditingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui mpeningkatan pelayanan publik di daerah, maka lembaga pemerintah di tingkat daerah seperti di Kecamatan Pulau Pisang dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat selama ini. Kecamatan Pulau Pisang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/508/B.II/HK/2012 tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.

VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bagian sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi dalam keseluruhan gambaran PDRB ini menunjukkan bahwa sebagai daerah pemekaran baru Kabupaten Pesisir Barat masyarakatnya masih berorientasi pada agraris, sektor-sektor industri dan jasa belum sepenuhnya berkembang dan perlu dukungan investasi dan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah. Perkembangan produksi kopi dan kelapa sebagai jenis tumbuhan utama yang memiliki hasil produksi besar terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sementara itu jenis tumbuhan yang tumbuh adalah hasil produksi kelapa sawit dan kakao mengalami kenaikan setiap tahun dalam produksinya. Sehingga aspek ekonomi berjalan efektif dengan wujudnya pendapatan daerah meningkat secara signifikan.
- b. Kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial meliputi pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang Pendidikan di Kecamatan Pulau Pisang persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan semakin menurun. Artinya masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Kesehatan Tidak ada pedoman khusus pelayanan kesehatan di puskesmas Kecamatan Pulau Pisang untuk mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu di daerah tersebut. Puskesmas Pulau Pisang masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Sumber daya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pulau Pisang belum memenuhi standar, ada beberapa tenaga kesehatan

yang sangat dibutuhkan dan ditingkatkan.

- c. Kesejahteraan masyarakat dalam aspek lingkungan dalam kegiatan ekowisata memberikan dampak positif antara lain dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar objek wisata. Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya transportasi dan sarana angkutan belum ada standar tarif retribusi ke pulau, fasilitas pasokan listrik pln belum ada, masih mengandalkan genset, dermaga pelabuhan belum berfungsi, kapasitas kecil dan berbahaya bagi penumpang, layanan komunikasi terbatas, hanya satu provider, ketergantungan musim ombak untuk surfing, komunikasi, akomodasi dan promosi belum baik, tidak ada sertifikat bahasa asing bagi pemandu, kualifikasi SDM masih rendah untuk mendukung ekowisata bahari, kegiatan kelompok sadar wisata

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Kebijakan pemekaran wilayah perlu dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif dari berbagai aspek, sehingga hasilnya berguna dalam pengambilan keputusan serta diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dari pemekaran wilayah.
- b. Meningkatkan sarana pendidikan. dengan pemekaran desa diharapkan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan sarana kesehatan dengan pemekaran desa diharapkan adanya tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya sebuah gedung kesehatan yang dapat memungkinkan meningkatnya mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan pemekaran adalah pelayanan dan dengan pemekaran ini masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.
- d. Meningkatkan sarana jalan adalah dengan pemekaran desa diharapkan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang akan menuntun pada peningkatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. (2017). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta
PT.Pradnya Paramita.
- Dunn, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan
Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Frans M. parera, dkk. (2000). *Demokrasi dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi
Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Hermanis slamet, dkk. (2015). *Sistem Perpetaan Dan Analisis Spasial Untuk
Perencanaan*. Yogyakarta: MPKD-UGM
- Kaloh. J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan daerah: Bagaimana membangun ekonomi lokal,
kota, dan kawasan*. Jakarta: Salemba Empat
- Miftachul Huda. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung :
PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D Riant. (2006). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi*

- Rasyid, R. (2017). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riadi, S. (2019). Analisis Pemekaran Wilayah Dan Potensi Konflik Di Kabupaten Donggala. Academia
- Riyadi, D. S. (2012). Pengembangan Wilayah Dan Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saragi, Tumpal Purwidaminto. (2016). Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, IREPress. Yogyakarta
- Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi,
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suradinata, Ermaya. (2000). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Untuk Meningkatkan Interrasi Bangsa. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan
- Suwandi. (2015). Desentralisasi Fisikal dan dampaknya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kabupaten/kota induk Provinsi Papua. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Wullur, Ver . (2009), Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat. Jakarta: PT grasindo

Jurnal dan Skripsi :

- Dommy, Monica L. (2019). Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hakim, Abdul. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Kabupaten Bengkalis). JOM Fekon, Vol. 4 No.1

- Harmantyo. (2017). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia.
- Hasriani. (2016). Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui kepulauan Kabupaten Morowali, jurusan Ekonomi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas halu Oleo Kendari.
- Hilman, Y. A. (2017). Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2),150. <https://doi.org/10.24905/jip.v2i2.711>
- Khairullah, & Cahyadin, M. (2016). Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Maulana, Sherlly, & Saraswaty, Rina. (2019). Perancangan Pusat Perbelanjaan dengan Tema Green Architecture di Kota Medan. *JAUR (Journal Of Architecture And Urbanism Research)*, 2(2), 98–113.
- Ratnawati, T. (2009). Pemekaran daerah: Politik lokal dan beberapa isu terseleksi. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Riani, I. A. P., & Pudjihardjo, M. (2012). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan Ketimpangan Antarwilayah Di Provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*
- Ristanti, Y., Akuntansi, E. H.-J. R. (Riset, & 2017, U. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal.Untidar.Ac.Id*. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/220>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/4128>
- Setiono, D. N. S. (2011). Ekonomi pengembangan wilayah: Teori dan aplikasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Simangunsong, F., & Simangunsong, F. (2016). Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i1.434>
- Sudiar, S. (2017). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. *E-Journals.Unmul.Ac.Id*, 1(3), 389–400. Retrieved from <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/316>
- Susanti. (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Waskitawati, D. (2018). Managing wastewater in decentralized indonesia: could local democracy improve public service? *CosmoGov*, 4(2), 213. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16627>
- Widayanti, A., and, D. D.-J. of E. R., & 2017, undefined. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah. *Journal.Umy.Ac.Id*, 1(2), 101–109.
- Widianingsih, I., & Pancasilawan, R. (2018). Organizational Network in the Development of Mamminasata Urban Areas, South Sulawesi Province. 103.76.50.195. <http://103.76.50.195/iap/article/view/653>
- Zuhro, R. Siti. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.

Sumber Dokumen :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negri No.28 Tahun 2006 Tentang Syarat Pembentukan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/508/B.LI/HK/2012 Tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pulau Pisang

Sumber Website :

<https://m.lampost.co/berita-terbengkalai-pembangunan-kantor-kecamatan-pulau-pisang-tak-kunjung-selesai.html> Diakses 11 April 2022

APBD Kabupaten Pesisir Barat. (2023). Data APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2023. Diakses melalui <https://pesisirbaratkab.go.id/apbd>